

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi masalah penting bagi manusia di seluruh dunia (Sholihin, 2021). Negara maju maupun negara berkembang juga menghadapi masalah kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinan warga di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan di negara maju (Hakim & Syaputra, 2020). Indonesia masih tergolong negara berkembang dan kemiskinan adalah masalah utama (Bambang Budhijana, 2019). Indonesia tergolong dalam daftar 100 negara termiskin di dunia. Berdasarkan pengukuran pendapatan nasional bruto per kapita yang juga dikenal dengan sebutan Gross National Income (GNI). Menurut World Population Review, Indonesia berada di peringkat ke-73 sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. (CNN INDONESIA, 2022). Sebagaimana dikatakan oleh (Malau et al., 2023) bahwa, “kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan sesuai standar hidup rata-rata masyarakat di suatu tempat.”

Sedangkan menurut Cahyat dan Gonner (2007) dalam Sari & Meirinawati (2024), kemiskinan adalah ketika seseorang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini dapat termasuk sandang, pangan, dan papan. Sedangkan menurut Kuncoro (2009) dalam Damanik & Sidauruk (2020) mengatakan bahwa, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum.

Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan agar dapat hidup dengan layak baik dari segi kebutuhan pangan maupun non-pangan. Beragam definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia diartikan sebagai suatu keadaan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya taraf hidup masyarakat, minimnya upah minimum, dan meningkatnya jumlah pengangguran tanpa cukup lapangan pekerjaan (Andika et al., 2024). World Bank (2012) dalam Dakhilullah (2023) mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan dan aset yang sangat rendah sehingga mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Kemiskinan juga dikaitkan dengan kurangnya kesempatan kerja. Masyarakat yang dianggap miskin, seringkali tidak memiliki pekerjaan dan disebut sebagai pengangguran (Dakhilullah, 2023). Kemiskinan di Indonesia juga berkaitan dengan ketidakseimbangan antara yang dianggap “kaya” dan yang dianggap “miskin.” (Pratama et al, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan di Indonesia sebagai keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rupiah per kapita per bulan (Arifin, 2020). Selain itu, laporan dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada bulan September 2024 garis kemiskinan berada diangka Rp595.242,00 per kapita (Badan Pusat Statistik, 2025), yang menunjukkan bahwa individu yang pengeluarannya di bawah jumlah tersebut dianggap miskin. Kelompok masyarakat miskin adalah seseorang dengan pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan (Kompas.com, 2018).

Pada bulan September 2024, terdapat 24,06 juta warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan sekitar 1,16 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2024, dan terjadi pengurangan sebesar 1,84 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2023. Persentase masyarakat miskin pada September 2024 mencapai 8,57%, yang memperlihatkan penurunan sebesar 0,46% dibandingkan dengan Maret 2024, dan penurunan 0,79% jika dibandingkan dengan Maret 2023. Menurut informasi dari Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir (Andi Audia Faiza Nazli Irfan, 2024). Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti juga mengungkapkan beberapa hal selama acara konferensi pers.

“Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tang secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590,00/rumah tangga miskin/bulan”

(Sumber:<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penduduk-miskin-di-indonesia-turun-0-46-persen-pada-september-2024>, diakses pada Sabtu, 15 Februari 2025, pukul 13.32).



Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013– September 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2025

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa statistik kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang periode September 2013 hingga September 2024 terlihat dengan adanya kenaikan dan penurunan pada tahun tertentu. Lonjakan jumlah dan rasio warga miskin pada bulan Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022 disebabkan oleh tingginya harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Jumlah dan persentasenya mengalami lonjakan pada bulan Maret dan September 2020 karena adanya pembatasan aktivitas penduduk akibat pandemi Covid-19 yang terjadi.

Di sisi lain, sebagai pulau terbesar dengan luas 128.297 km² yang saat ini dihuni oleh 151,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 1.121 jiwa/km². Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (Kompas.com, 2022). Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang di Indonesia dan menyumbang sebagian besar aktivitas industri dan perdagangan, maka distribusi masyarakat miskin banyak terkonsentrasi di pulau Jawa (Kompasiana.com, 2024). Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa yang lebih tinggi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kesenjangan pendapatan, akses yang terbatas terhadap sumber daya, dan ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Kompasiana.com, 2024).



Gambar 1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau, September 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2025

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa warga miskin paling banyak terkonsentrasi di pulau Jawa. Amalia Adininggar Widyasanti, yang memegang jabatan sebagai Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

mengungkapkan bahwa terdapat 12,62 juta orang, atau 52,45% dari 24,06 juta masyarakat miskin, tinggal di Pulau Jawa. Beliau menyampaikan beberapa hal dalam konferensi pers

“Karena jumlah penduduk di Pulau Jawa ini memang sekitar 55,84% dari total penduduk Indonesia, maka tentunya normal bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak ada di Pulau Jawa” (Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/penduduk-miskin-paling-banyak-ada-di-pulau-jawa-ini-penjelasan-bps>, diakses pada Sabtu, 15 Februari 2025, pukul 13.53).

Angka ini menunjukkan bahwa pulau jawa merupakan pusat perekonomian, namun permasalahan kemiskinan di pulau jawa masih menjadi hal yang sangat krusial (Fauziah et al., 2022). Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa terdapat penurunan jumlah masyarakat miskin di Pulau Jawa sebesar 0,43% pada Maret 2024, sehingga persentasenya berkurang dari 8,48% menjadi 8,05% (Kontan.co.id, 2025).

Menurut informasi dari badan pusat statistik jika dilihat dari beberapa provinsi di pulau Jawa, Jawa Timur menduduki posisi teratas dengan jumlah warga miskin 4.189 juta jiwa. Jawa Barat menempati posisi kedua, dengan 3.889 juta jiwa dan Jawa Tengah dengan 3.792 juta jiwa penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain itu, provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Banten, memiliki 791.610 orang miskin. DKI Jakarta, pusat bisnis dan ekonomi Indonesia, memiliki 464.930 orang miskin di berbagai kota, dan DI Yogyakarta, kota budaya dan pendidikan, memiliki 445.550 orang miskin, yang merupakan tingkat

kemiskinan tertinggi, 10,83% dari total penduduk (Bryan Reynaldy, 2024). Namun, pada tahun 2024 kemiskinan di provinsi Jawa Timur menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencatat bahwa ada penurunan 0,23 persen pada bulan september 2024, sehingga totalnya menjadi 9,56 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2024 (Suara surabaya.net, 2025). situasi tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zulkipli selaku Kepala BPS provinsi Jawa Timur saat konferensi pers pada 15 Januari 2025.

“Kita tahu tingkat pengangguran mengalami penurunan dan bantuan yang diberikan pemerintah baik pusat mau pun provinsi atau kota juga sangat membantu”

(Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/bps-mencatat-persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-turun-023-persen>, diakses pada Sabtu 15 Februari 2025, pukul 15.20).

Kepala BPS Jatim juga menjelaskan, tingkat inflasi yang relatif terkendali di 1,73% per tahun selama periode Maret 2024 hingga September 2024 merupakan salah satu dari banyak aspek yang mempengaruhi penurunan kemiskinan (Suara surabaya.net, 2025). Beliau juga menambahkan bahwa laju ekonomi Jatim meningkat mencapai 4,91 persen pada Triwulan III 2024 secara *year on year*.

“Dari data yang kami dapatkan banyak hal di Jatim yang bertumbuh positif. Kami lihat perkembangan harga sangat stabil. Kemudian pertumbuhan ekonomi sangat baik.”

(Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/bps-mencatat-persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-turun-023-persen>, diakses pada Sabtu 15 Februari 2025, pukul 15.27).

Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberian bantuan dan

pembukaan kesempatan kerja. Salah satu program pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya (Mulyadi, 2018). Program Padat Karya ini dicetuskan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah Indonesia dengan melibatkan orang miskin, setengah penganggur, dan penganggur (Sari & Meirinawati, 2024). Program padat karya adalah sebuah program yang lebih mengandalkan kerja manusia daripada mesin. (Widyastuti et al., 2021).

Padat Karya merupakan program yang berfokus untuk meningkatkan kehidupan warga miskin dengan mengoptimalkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi yang tersedia. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga daya beli masyarakat. (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021). Program yang dikelola oleh pemerintah melalui Bappenas bertujuan memberikan kesempatan kerja kepada keluarga miskin yang mengalami kehilangan pendapatan atau pekerjaan tetap. Program ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan selama masa sulit (Widyastuti et al., 2021).

Pelaksanaan program kerja padat karya diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2021, yang menjelaskan cara pelaksanaan Program kerja Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemilihan dan penetapan lokasi

kegiatan padat karya ditentukan setelah mengidentifikasi potensi sumber daya lokal dari calon lokasi sehingga, kegiatan padat karya diberikan sesuai dengan kriteria (DITJEN BINAPENTA DAN PKK, 2018).

Adapun penetapan lokasi kegiatan padat karya ditentukan melalui identifikasi jumlah penerima manfaat seperti jumlah penerima manfaat (penganggur, setengah pengangguran, PMI purna, korban PHK, dan masyarakat miskin, ketersediaan prasarana, dukungan sumber daya alam dan tenaga kerja serta potensi peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan program padat karya melibatkan berbagai pihak antara lain, sub direktorat Pengembangan Padat Karya, Direktorat PPKK, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, Lembaga Non Pemerintah, dan Pemerintah Desa (DITJEN BINAPENTA DAN PKK, 2018).

Konsep program padat karya adalah menggunakan dan menyerap pekerja dalam jumlah besar (Yuliana, 2022). Program padat karya ini sudah dilaksanakan di beberapa lokasi yang sudah ditetapkan, salah satunya kabupaten banyuwangi yang telah melaksanakan program padat karya dan memperoleh hasil yang cukup baik karena program ini berkontribusi dalam salah satu upaya pemkab banyuwangi untuk menurunkan kemiskinan. Angka kemiskinan di kabupaten banyuwangi menurun sebesar 0,8 persen dari yang semula 7,34 persen menjadi 6,54 persen (Pawarta Jawa Timur, 2024). Sementara itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota yang juga ikut menggerakkan Program Padat

Karya. Hal tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah kota Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Dikutip dari [kompas.com](https://www.kompas.com), Eri Cahyadi mengatakan bahwa menerapkan program Padat Karya adalah salah satu cara yang dilaksanakan untuk menurunkan kemiskinan (Kompas.com, 2023).

Program ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023. Dalam pasal 1 Ayat 19, dijelaskan bahwa Padat Karya merupakan jenis program yang dirancang untuk memberdayakan keluarga miskin. Program tersebut memanfaatkan potensi alam, pekerja, dan teknologi yang tersedia dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan penghasilan warga dan menjaga kekuatan konsumsi masyarakat. Program Padat Karya Surabaya, yang diusulkan oleh Eri Cahyadi, berkonsentrasi pada kebutuhan dan kondisi unik Kota Surabaya. Ini akan melibatkan proyek infrastruktur lokal, perbaikan lingkungan, dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Kota Surabaya (Sari & Meirinawati, 2024).

Tujuan dari program padat karya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja bagi Masyarakat miskin dan pengangguran, terutama bagi seseorang yang terdampak penurunan penghasilan dan pemutusan hubungan kerja (Lafina et al., 2023). Sasaran atau penerima manfaat dari program Padat Karya di Surabaya yaitu keluarga miskin (Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023). Dalam wawancara pra-penelitian dengan Bapak Miftahul Huda selaku staff

Dinas Sosial Kota Surabaya Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, beliau menyatakan beberapa hal.

“Penerima manfaat program padat karya ini adalah warga miskin yang sesuai dengan kriteria dalam perwali Kota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022. Padat karya yang didapatkan nantinya akan disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh sasaran penerima manfaat program.”

(Hasil wawancara pra-penelitian, Selasa 10 Desember 2024).

Berdasarkan hasil pra-penelitian, beliau mengatakan bahwa sasaran penerima program padat karya tersebut adalah warga miskin yang memiliki kompetensi dan keahlian. Mekanisme pelibatan keluarga miskin dalam program Padat Karya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat program atau kegiatan padat karya di beberapa kecamatan. Kemudian kecamatan menawarkan program atau kegiatan tersebut kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam database keluarga miskin Pemerintah Kota Surabaya.

Program padat karya memiliki dua alur. Alur pertama meliputi penyediaan fasilitas dan layanan pemerintah yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sah. Disisi lain, fokus pada alur kedua adalah pada pemberdayaan serta pengelolaan usaha kecil, di mana keluarga yang kurang mampu menjadi penerima manfaat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah (Radar Surabaya, 2024). Menurut informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, saat ini terdapat 102 lokasi usaha padat karya yang berjalan, sesuai dengan hasil pengamatan dan penilaian pada

kuartal ketiga tahun 2024 (Kominfo Jatim, 2024).

Dikutip dari surabaya.tribunnews.com, Walikota Surabaya mengatakan bahwa bentuk pelatihan atau pekerjaan yang ditawarkan meliputi usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, cafe, pusat wisata kuliner, dan jenis usaha lainnya (Surabaya tribun news.com, 2024). Pelatihan tersebut dikelola oleh dinas terkait yang bertanggungjawab atas program padat karya, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, antara lain: Organisasi Perangkat Daerah Pengampu (OPD), swasta, kecamatan, kelurahan, serta tokoh masyarakat. Setiap pihak memiliki tugas dan kontribusi yang saling melengkapi.

Organisasi Perangkat Daerah Pengampu (OPD) berperan dalam berkoordinasi dengan camat, kelurahan dan pihak terkait kebutuhan wilayah dan masyarakat yang menjadi sasaran program, menyediakan pelatihan atau bimbingan teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan kegiatan padat karya sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing OPD, mengelola dana program secara transparan, serta melakukan monitoring secara berkala terhadap kegiatan padat karya. Swasta berperan menjadi mitra pemerintah dalam melakukan rekrutmen atau seleksi tenaga kerja lokal

Kecamatan dan kelurahan berperan mengidentifikasi masyarakat miskin yang akan menjadi peserta atau penerima program padat karya, melakukan pendataan calon penerima program padat karya, menyampaikan informasi tentang padat karya kepada masyarakat,

menjadi penghubung antara OPD Pengampu dan masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya padat karya diwilayahnya. Tokoh masyarakat berperan menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan warga, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah terkait jenis kegiatan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program padat karya mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui koordinasi secara rutin, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama. Kolaborasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan utama program padat karya, yaitu meningkatkan pendapatan serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin dan pengangguran, terutama bagi mereka yang mengalami penurunan penghasilan dan kehilangan pekerjaan tetap.

Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat menjelaskan, program ini melibatkan kolaborasi lintas Perangkat Daerah (PD) dengan pendekatan yang terstruktur.

“Setiap PD di lingkup Pemkot Surabaya bertugas mengampu dan mengawal pelaksanaan Program Padat Karya sesuai kewenangan dan urusan pemerintahan masing-masing.”

(Sumber:<https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775401630/atasi-kemiskinan-dan-pengangguran-pemkot-optimalkan-program-padat-karya?page=2>, diakses pada Sabtu 15 Februari 2025, pukul 16.28).

Beliau mengatakan bahwa setiap PD dalam Pemerintah Kota Surabaya memiliki tugas untuk mendukung dan mengawasi penyelenggaraan program padat karya sesuai tanggung jawab dan peran

masing-masing. Di Kota Surabaya tidak semua OPD terlibat dalam pelaksanaan program padat karya. Adapun tabel berikut ini merupakan tabel jenis program padat karya yang diberikan serta OPD pengampunya.

Tabel 1.1. Jenis Program Padat Karya Berdasarkan OPD Pengampu

No	Jenis Program	OPD Pengampu
1.	a. Budidaya Perikanan b. Budidaya Pertanian (Cabai, Bayam, Sawi) c. Budidaya Pertanian (Cabai, Terong, Sawi) d. Budidaya Pertanian (Jagung, Semangka, Kangkung) e. Budidaya Pertanian (Ketela, Melon) f. Budidaya Peternakan Ayam	DKPPP
2.	a. Cuci Helm b. Cuci Sepatu c. Jahit Seragam Hijab Vermak d. Sliper e. Stnd Kosong Swk f. Toko Kelontong	DINKOPDAG
3.	a. Perawat Balita b. Perawat Bayi c. Perawat Lansia	DKK
4.	a. Cafe Barista b. Cuci Mobil c. Cuci Motor	BPKAD
5.	a. Laundry b. Rumah Batik	DISBUDPORAPAR
6.	a. Pekerjaan Bangunan Ktpr b. Satgas Rutilahu	DPRKPP
7.	a. Pemasangan Paving b. Produksi Paving	DSDABM
8.	a. Service AC	DISPERINAKER
9.	a. Budidaya Tanaman Hias	DLH

Sumber: BPJAP, 2024

Berdasarkan informasi tabel di atas, diketahui bahwa sejumlah OPD ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program padat karya. Program yang disediakan beragam, mencakup pelatihan maupun

pemberian modal usaha. Selain memberikan modal, pemerintah kota Surabaya juga melaksanakan intervensi melalui penyaluran kesempatan kerja, yang sering disebut padat karya disalurkan ke pihak lain. Hal ini ditujukan untuk menempatkan tenaga kerja pada sektor formal maupun informal. Contoh penyaluran bekerja ini adalah usaha Perangkat Daerah Pemkot Surabaya untuk menunjukkan komitmen kerja sama yang terjalin dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2024). Pada wawancara pra-penelitian, Bapak Miftahul Huda selaku staff dinas sosial kota Surabaya pada bidang perlindungan dan jaminan sosial menyampaikan beberapa hal.

“Padat karya ini banyak jenisnya. Ada padat karya tunai, padat karya bantuan modal, rumah padat karya, dan padat karya yang diserahkan ke pihak lain yaitu dapat berupa diberi pekerjaan sebagai ART, Pekerja UMKM, Tenaga kontrak, dan karyawan di perusahaan swasta.”

(Hasil wawancara pra-penelitian, Selasa 10 Desember 2024).

Berdasarkan hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya telah melakukan banyak usaha untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai jenis program padat karya yang disediakan. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Surabaya. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah masyarakat yang hidup di bawah standar minimum di Kota Surabaya dengan pengeluaran per orang sebesar Rp. 742. 678 setiap bulan pada bulan September 2024 adalah 116,62 ribu orang. Jumlah tersebut tersebar dalam 30 kecamatan di Kota Surabaya. Hal ini

dapat mengaibatkan berbagai masalah yang kompleks di masyarakat (Amin, 2022). Berikut merupakan data penduduk miskin di Kota Surabaya berdasarkan kecamatan.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Berdasarkan Kecamatan tahun 2024

No	Kecamatan	Miskin
1	SEMAMPIR	8130 Orang
2	KREMBANGAN	7064 Orang
3	TEGALSARI	5762 Orang
4	SAWAHAN	5302 Orang
5	WONOKROMO	5127 Orang
6	TAMBAKSARI	4862 Orang
7	KENJERAN	4298 Orang
8	PABEAN CANTIAN	3736 Orang
9	SIMOKERTO	3070 Orang
10	KARANG PILANG	2667 Orang
11	WONOCOLO	2646 Orang
12	SAMBIKEREP	2488 Orang
13	SUKOLILO	2409 Orang
14	JAMBANGAN	1645 Orang
15	GUBENG	1513 Orang
16	DUKUH PAKIS	1499 Orang
17	SUKOMANUNGGAL	1161 Orang
18	GENTENG	1095Orang
19	PAKAL	762Orang
20	MULYOREJO	719 Orang
21	BUBUTAN	710 Orang
22	WIYUNG	586 Orang
23	ASEM ROWO	447 Orang
24	LAKARSANTRI	393Orang
25	TENGGILIS MEJOYO	282 Orang
26	BULAK	267 Orang
27	GAYUNGAN	221 Orang
28	BENOWO	216 Orang
29	GUNUNG ANYAR	123 Orang
30	RUNGKUT	60 Orang

Sumber: Pemerintahan.surabaya.go.id

Diakses pada 19 Maret 2025

Merujuk pada tabel di atas, terlihat bahwa kecamatan semampir memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Kota Surabaya. Kecamatan semampir yang terdiri dari lima kelurahan yakni, kelurahan ampel, pegirian, sidotopo, ujung, dan wonokusumo merupakan salah satu daerah yang menjalankan program padat karya di Surabaya. Dalam wawancara pra-penelitian dengan Ibu Verawati, sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Semampir beliau mengatakan beberapa hal.

“Program ini masih dilaksanakan hingga saat ini dan sasaran dari program padat karya ini warga miskin.
(Hasil wawancara pra-penelitian, Jumat 8 November 2024).

Beliau menyampaikan bahwa terdapat berbagai jenis padat karya yang dilaksanakan di kecamatan semampir. Ada dua jenis padat karya di kecamatan semampir yaitu dalam bentuk pelatihan dan jenis padat karya bantuan modal. Padat karya bentuk pelatihan berfokus pada pemberian pelatihan sedangkan padat karya bantuan modal lebih berfokus pada pemberian bantuan berupa modal usaha bagi warga miskin dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin tersebut. Berikut tabel jenis padat karya yang berada di Kecamatan Semampir.

Tabel 1.3 Jenis Program Padat Karya di Kecamatan Semampir

No	Jenis Program	Peserta atau penerima	OPD Pengampu
1.	a. Jahit Seragam Hijab Vermak (Mesin Jahit) b. Toko Kelontong (Etalase)	a. 33 orang b. 1 orang	DINKOPDAG
2.	Cuci Motor	2 orang	BPKAD
3.	Service AC	1 orang	DISPERINAKER

Sumber: Data olahan penulis

Mengacu pada tabel di atas dapat diketahui jenis program padat karya yang berada di kecamatan semampir. Servis ac merupakan padat karya dalam bentuk pelatihan sedangkan jahit seragam, toko kelontong dan cuci motor merupakan padat karya bantuan modal. Program padat karya yang dilakukan di kecamatan semampir masih tetap dilaksanakan sampai sekarang, akan tetapi masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya, seperti pada peserta padat karya servis ac yang membutuhkan waktu cukup lama untuk pelatihan. Kemudian pada warga miskin yang diberi bantuan etalase terkadang enggan menerima dan menolak.

Ibu Verawati selaku kepala seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian menyampaikan bahwa sasaran padat karya adalah warga miskin yang ditentukan melalui proses seleksi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang mulanya dilakukan melalui seleksi dari RT. Hasil seleksi tersebut dibuktikan dengan survei langsung ke rumah warga (Putri & Ismail, 2024).

“Pertama seleksi dari RT dahulu kemudian diserahkan ke

kelurahan dan diverifikasi kembali oleh kelurahan. Kemudian kelurahan menyampaikan usulan ke kecamatan. Setelah itu usulan tersebut dimasukkan ke dalam website padat.karya.go.id yang kemudian nantinya akan ditindak lanjuti mengenai bentuk program padat karya yang sesuai.”

(Hasil wawancara pra-penelitian, Jumat 8 November 2024).

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa data warga miskin tersebut dimasukkan ke dalam website padat karya.surabaya.go.id untuk nantinya akan ditindak lanjuti kembali.

The screenshot displays the 'Padat Karya' web application interface for Kecamatan Semampir. The left sidebar contains navigation options: Beranda, Monitoring, Master, Entry Data, Pengentasan Kemiskinan, and Buku Panduan. The main content area features a summary dashboard with six data boxes:

TOTAL WARGA MISKIN 2.604 KK 8.130 Jiwa	PENDAPATAN PERKAPITA < 742.678 2.091 KK 6.400 Jiwa	PENDAPATAN PERKAPITA >= 742.678 506 KK 1.712 Jiwa	PENDAPATAN PER KAPITA < 742.678 2.076 KK 6.356 Jiwa	PENDAPATAN PER KAPITA >= 742.678 & <= 1.188.284 455 KK 1.581 Jiwa	PENDAPATAN PER KAPITA > 1.188.284 73 KK 193 Jiwa
---	--	---	---	--	--

Below the summary is a filter section with the following fields:

- Kecamatan: SEMAMPIR
- Kelurahan: - Pilih Kelurahan -
- RW: - Pilih RW -
- RT: - Pilih RT -
- Usia Min: - Pilih Usia -
- Usia Max: - Pilih Usia -
- Status Entry Desk: - Pilih Status Entry Desk -
- Status Desk: - Pilih Status Desk -
- Pendapatan Perkapita: - Pilih Pendapatan Perkapita -
- Status Warga Final: - Pilih Warga Final -
- Pendapatan Perkapita + Bantuan: - Pilih Pendapatan Perkapita + Bantuan -
- Status Warga Final + Bantuan: - Pilih Warga Final + Bantuan -
- Status KK: - Pilih Status KK -
- Pendapatan KK: - Pilih Pendapatan KK -
- Status Finalisasi: - Pilih Status Finalisasi -
- Status Verif Desk: - Pilih Status Verif Desk -
- No KK: Input KK
- NIK: Input NIK

At the bottom right, there are two green buttons: '8.130 Jiwa' and '2.604 KK'. A 'Filter' button and a 'Reset' button are also present.

Gambar 1.3 Halaman Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Semampir
Sumber: padatkarya.surabaya.go.id

Gambar di atas menunjukkan bahwa total warga miskin yang menjadi sasaran penerima manfaat program padat karya sejumlah 8.130 jiwa dengan 2.604 jumlah KK. Adapun rincian data jumlah warga miskin di masing-masing kelurahan di bawah ini.

Tabel 1.4 Data Capaian pengentasan kemiskinan per kelurahan di Kecamatan Semampir

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama OPD Pengampu	Total Warga (Satuan KK)	Menolak dan Tidak Bisa Diberi Intervensi (Satuan KK)		Bekerja (Satuan KK)	Belum bekerja (Satuan KK)	Bekerja Pendapatan (Satuan KK)		
					Menolak	Tidak bisa diintervensi			0 rupiah	0 - < 4 juta	< 4 juta
1	Semampir	Ampel	Dispendukcapil	453	0	122	331		331	0	0
2	Semampir	Pegirian	Dispendukcapil	895	0	126	767		1	679	87
3	Semampir	Sidotopo	Dispendukcapil	856	0	180	676		603	71	2
4	Semampir	Ujung	Dispendukcapil	186	0	51	134		0	98	36
5	Semampir	Wonokusumo	Dispendukcapil	214	0	85	85	0	0	76	9

Sumber: Padatkarya.surabaya.go.id

Tabel di atas menunjukkan jumlah masyarakat miskin di masing-masing kelurahan yang menjadi sasaran penerima manfaat program padat karya. Dapat diketahui bahwa ada kolom tidak dapat diintervensi. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya tantangan dalam implemetasi program padat karya. Riset yang dilakukan oleh (Pandita et al., 2024) yang berjudul Implementasi Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2024 menjelaskan bahwa Implementasi padat karya di kecamatan semampir masih belum maksimal dan masih terdapat tantangan, sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam menggunakan pendekatan *Collaborative Governance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu **“Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian bertujuan untuk mencari, mencoba, dan memperluas pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan efek positif baik dari segi teori maupun praktik, dalam bidang Administrasi Publik. Berikut adalah manfaat penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pertimbangan dan memberikan pemahaman menyeluruh di masa mendatang. Selain itu, temuan ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penelitian yang berhubungan dengan administrasi publik, khususnya mengenai *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan dan referensi bagi para pembaca, terutama bagi kalangan akademis yang mendalami bidang administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya dalam kajian *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan tambahan bagi perpustakaan serta sebagai sumber literatur untuk penelitian serupa di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Kecamatan Semampir

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan tentang *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Padat Karya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.